

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Hugh Miall, D. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subrata, W. S. (1999). *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Yogyakarta: Upp Ampykpnjogja.
- Sugiyono. (2017)., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafii, I. K. (2015). *Manajemen Konflik*. Yogyakarta.
- Ulaen, A. J. (2016). *Pemekaran Wilayah :Haruskah Ke Akar Etnis*. Yogyakarta: Ombak.

### **Karya Ilmiah :**

- Dewi, A. S. (2015). *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Batu Bara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ginting, H. V. (2017). *Sistem Pengamanan Terhadap Aset Tidak Bergerak Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Patimah, T. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Rizky, M. (2014). *Konflik Aset Di Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional Di Tangerang Selatan*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Sadali, A. R. (2013). *Dampak Pemekaran Dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Dan Sengketa Aset Pasca-Pemekaran Periode 2001-2013)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Sofa, N. A. (2015). *Pembangunan Daerah Pasca Pemekaran Di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2011-2015*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **Jurnal**

- Halim, R. S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 13. Nomor 02*, 31-33.
- Jalil, M. (2014). Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ejournal Lmu Komunikasi, 2014, Volume 2 Nomor 4*, 15-29.
- Muhamad Fauzan, K. P. (2014). Jurnal Media Hukum. *Model Kerja Sama Antar Daerah Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran*, 199.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Kedepan. *Jurnal Konstitusi*, 292.
- Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 46 No. 1*, 70-89.
- Sulaeman, M. (2015). Resolusi Konflik Pendekatan Ilmiah Modern Dan Model Tradisional Berbasis Pengetahuan Lokal (Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *Sosiohumaniora, Volume 17 No. 1*, 41- 48.
- Umin, F. (2014). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, 70-71.
- Yusaputra, M. I. (2014). Resolusi Konflik Masyarakat Kelurahan Baiya Dan Kelurahan Lambara. *Jurnal Academica Fisip Untad Vol.06 No. 02*, 1321-1325.
- Agung, F. Y. (2013). Sengketa Aset Pasca Pemekaran Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Volume 1 Nomor 2*, 151-164.

## **Artikel**

- Banjar, B. K. (2016, Mei 26). *Pengelolaan Aset Daerah*. Diambil Kembali Dari [Http://Bpkad.Banjarkab.Go.Id](http://Bpkad.Banjarkab.Go.Id):  
[Http://Bpkad.Banjarkab.Go.Id/Index.Php/2016/05/26/Pengelolaan-Aset-Daerah/](http://Bpkad.Banjarkab.Go.Id/Index.Php/2016/05/26/Pengelolaan-Aset-Daerah/)
- Herdiana, D. (2014, Juni Jumat). *Kota Tasikmalaya Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian Dari Bpk*. Diambil Kembali Dari [Jabar.Tribunnews.Com](http://Jabar.Tribunnews.Com):  
[Http://Jabar.Tribunnews.Com/2014/06/13/Kota-Tasikmalaya-Dapat-Opini-Wajar-Dengan-Pengecualian-Dari-Bpk](http://Jabar.Tribunnews.Com/2014/06/13/Kota-Tasikmalaya-Dapat-Opini-Wajar-Dengan-Pengecualian-Dari-Bpk)
- Nadjemuddin, A. (2016, November 23). *234 Daerah Ajukan Diri Jadi Calon Daerah Otonom Baru*. Diambil Kembali Dari [Antarnews.Com](http://Antarnews.Com):

<https://M.AntaraneWS.Com/Berita/597728/234-Daerah-Ajukan-Diri-Jadi-Calon-Daerah-Otonom-Baru>

Rumahnkri. (2016, November 22). *Persoalan Aset Kota Dengan Kabupaten Tasikmalaya Belum Selesai?* Diambil Kembali Dari Rumahnkri.Net: <http://Rumahnkri.Net/Persoalan-Aset-Kota-Dengan-Kabupaten-Tasikmalaya-Belum-Selesai/>

Wahyudi, A. (2015, 11 17). *Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan*. Diambil Kembali Dari Portagaruda.Com: [Download.Portagaruda.Org/Article.php?...Konflik,%20konsep](http://Download.Portagaruda.Org/Article.php?...Konflik,%20konsep)

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Daerah

Keputusan Gubernur 130/24 otdaksm, nomor 073/ksa.13-Pe/X/2013, dan nomor 028/Mou.38-Aset/2013

Keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 030/Kep.366-DPPKAD/2013